



Disnakerind
Tanah Laut

LAPORAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPUPD - SKPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA**
 2. **URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN**
-



JL. A. SYAIRANI KOMP. PERKANTORAN
Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan 70815
TELP. (0512) 21165



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan dalam menyelesaikan LAPORAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPUPD - SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan dalam prinsip Otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian telah diselesaikan beberapa cacatan penting yaitu : pelatihan dan penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, harmonisasi hubungan industrial, peningkatan kualitas IKM.

Seiring dengan penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2021 belum ditemukan permasalahan yang berarti namun Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut beserta segenap jajarannya berupaya mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun kritik dan saran membangun senantiasa diharapkan sebagai barometer perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Demikian LPUPD - SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021 disusun, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada kita semua..... Aamiin.

Pelaihari, 17 Januari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum SKPD.	1
a) Struktur Organisasi.....	1
b) Kepegawaian	3
c) Kondisi Sarana dan Prasarana	4
d) Data Statistik.....	6
e) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	24
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	25
1. Urusan Wajib (Bidang Ketenagakerjaan).....	25
a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)	25
b. Program Kegiatan	25
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	26
d. Permasalahan dan Solusi	27
2. Urusan Pilihan (Bidang Perindustrian).....	28
a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja).....	28
b. Program Kegiatan	28
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	28
d. Permasalahan dan Solusi	29
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kesekretariatan).....	29
a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja).....	29
b. Program Kegiatan	29
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	32
d. Permasalahan dan Solusi	34
4. Urusan Pemerintahan Umum.....	34
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	35
a. Dasar Hukum.....	35
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan / Dana Dekonsentrasi	36

c. Program, Kegiatan	37
d. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan	37
e. Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan	38
f. Realisasi Pelaksanaa Program dan Kegiatan	38
g. Permasalahan dan solusi	40
 BAB IV	 41
1. Kerja Sama Daerah.....	41
a. Mitra yang diajak kerjasama.....	41
b. Dasar Hukum	41
c. Bidang Kerjasama.....	41
d. Nama Kegiatan	41
e. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	41
f. Jangka waktu kerjasama	41
g. Hasil (output) dari kerjasama	41
h. Permasalahan dan Solusi	41
2. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	41
3. Pengelolaan Kawasan Khusus	41
a. Jenis Kawasan Khusus :	41
b. Status kepemilikan kawasan khusus :	41
c. Sumber Anggaran :	41
d. Permasalahan yang dihadapi :	42
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	42
5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	42
 BAB V PENUTUP.....	 43
1. Kesimpulan.....	43

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.	Tabel 1.1 (Gambaran Sarana Dan Prasarana Tahun 2021)	6
2.	Tabel 1.2 (Rekapitulasi Data Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja)	7
3.	Tabel 1.3 (Rekapitulasi Data Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)	8
4.	Tabel 1.4 (Rekapitulasi Data Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2021)	10
5.	Tabel 1.5 (Pengesahan Peraturan Perusahaan Tahun 2021)	11
6.	Tabel 1.6 (Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2021)	11
7.	Tabel 1.7 (Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan)	12
8.	Tabel 1.8 (Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Tahun 2021)	12
9.	Tabel 1.9 (Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Tahun 2021)	13
10.	Tabel 1.10 (Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Outsourcing Tahun 2021)	14
11.	Tabel 1.11 (Indeks Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepesertaan formal)	13
12.	Tabel 1.12 (Indeks Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepesertaan informal)	17
13.	Tabel 1.13 (Data Jumlah Lembaga Kerja Sama Bipartit 2021)	18
14.	Tabel 1.14 (Data Jumlah Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB))	18
15.	Tabel 1.15 (Data Tahapan Kasus Perselisihan HI)	20
16.	Tabel 1.16 (Data Jumlah Pemutusan Hubungan Kerja)	20
17.	Tabel 1.17 (Data Statistik Jumlah IKM dan Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan)	21
18.	Tabel 1.18 (Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang menggunakan Inovasi dan Teknologi)	21
19.	Tabel 1.19 (Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang Meningkatkan Kreatifitas)	21
20.	Tabel 1.20 (Data Statistik Jumlah Kumulatif IKM)	22
22.	Tabel 1.21 (Data Statistik Jumlah Perusahaan dalam SIINAS Tanah Laut)	22
23.	Tabel 1.22 (Data Statistik Rekomendasi Perizinan Industri yang diterbitkan)	22
24.	Tabel 1.23 (Data Statistik Fasilitasi Perizinan IUMK OSS)	22
25.	Tabel 1.24 (Data Statistik Penjualan Produk IKM di Dekranasda)	23
26.	Tabel 1.25 (Data Statistik Penjualan Produk IKM di Gedung Pusat Promosi)	23

27.	Tabel 1.26 (Data Statistik Jumlah Pameran Pameran IKM)	23
28.	Tabel 1.27 (Rekapitulasi Data Pelatihan Berbasis Kompetensi Oleh BLK Tahun 2020)	23
29.	Tabel 2.1 (Alokasi dan Realisasi Bidang Ketenagakerjaan)	27
30.	Tabel 2.2 (Alokasi dan Realisasi Bidang Perindustrian)	29
31.	Tabel 2.3 (Alokasi dan Realisasi Bidang Kesekretariatan)	32
32.	Tabel 3.1 (Rencana Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Balai Latihan Kerja)	37
33.	Tabel 3.2 (Rencana Anggaran Program Dekonsentrasi)	38
34.	Tabel 3.3 (Rincian Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi)	38
35.	Tabel 3.4 (Realisasi Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi)	39
35.	Tabel 3.5 (Realisasi Anggaran Program Dekonsentrasi)	39
36.	Tabel 3.6 (Rincian Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi)	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 71. Undang-undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

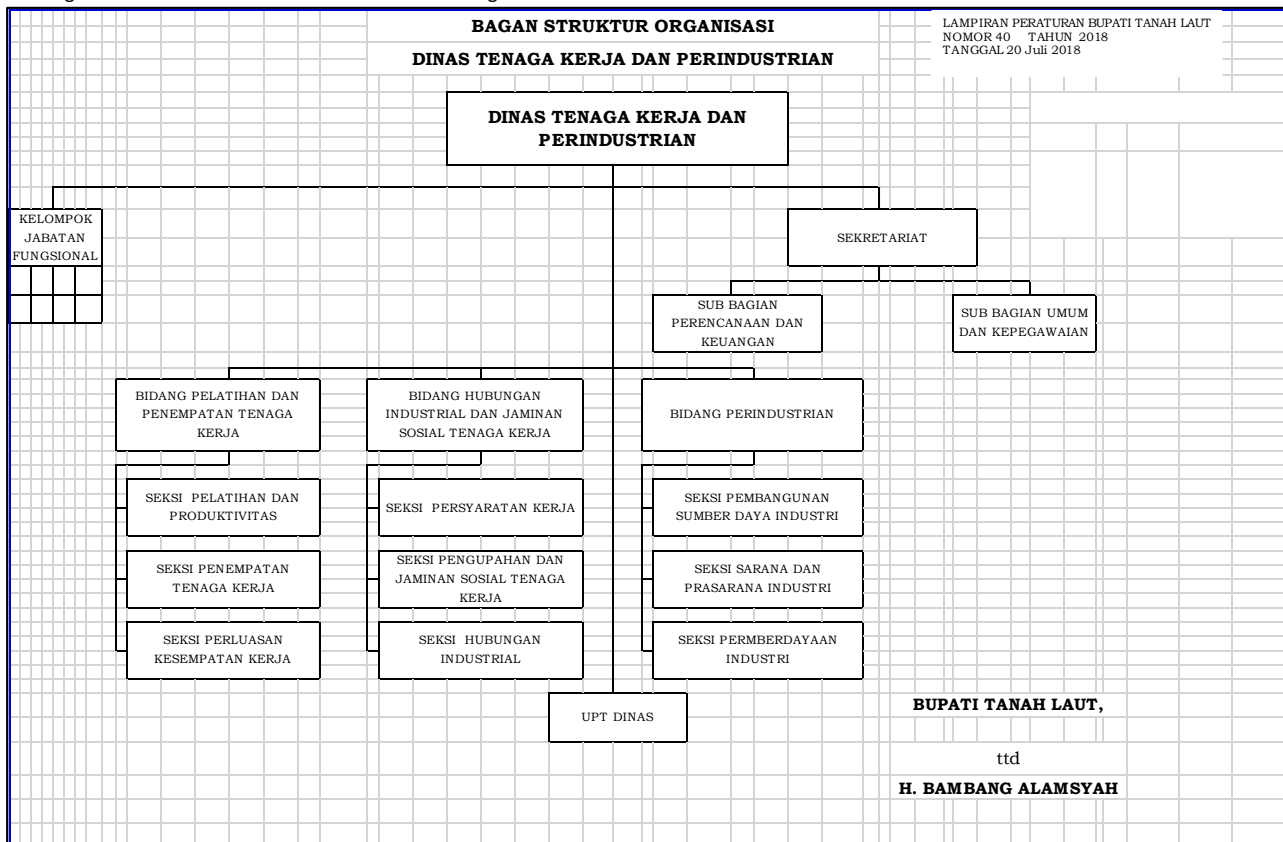
B. Gambaran Umum SKPD.

a) Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

- 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:
- 1) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Hubungan Industrial.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
- 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Industri.
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perda Nomor : 6 Tahun 2016
 Tanggal : 18 Nopember 2016
 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



b) Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, sampai Bulan Desember 2021 adalah 39 Orang yang terdiri dari :

- Berdasarkan Pendidikan :

S2	=	5	orang
S1	=	24	orang
D3	=	5	orang
SLTA	=	6	orang

a) Berdasarkan Golongan :

IV/c	=	1	orang
IV/b	=	2	orang
IV/a	=	3	orang
III/d	=	11	orang
III/c	=	4	orang
III/b	=	9	orang
III/a	=	5	orang
II/d	=	4	orang
II/c	=	-	orang
II/b	=	-	orang
I/c	=	1	orang

- Menurut Jabatan Struktural / Fungsional adalah :

Kepala Dinas (Eselon II b)	=	1	orang
Sekretaris (Eselon III a)	=	1	orang
Kepala Bidang (Eselon III b)	=	3	orang
Kasubbag / Kepala Seksi (Eselon IV a)	=	11	orang
Kasubbag TU. BLK (Eselon IV b)	=	1	orang
Jabatan Fungsional / Instruktur	=	9	orang
Non jabatan / staf	=	14	orang

c) Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
				2	
				v	1
				2	5
				11	1
					4
					13
					1
				2	1
				1	
				2	
					2
				1	2

44.	Mesin Gerinda	11	v		
45.	Mesin Kompresor	2	2		
46.	Mesin Gerinda Tangan	1	-		
47.	Mesin Bor Tangan	2	v		
48.	Perkakas Bengkel Lain-Lain	11	11		1
49.	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	2	1	1	
50.	Mesin Gergaji	3	v		
51.	Mesin Ketam	1	v		
52.	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	7	6	1	
53.	Peralatan Las Lain-lain	14	13	1	
54.	Receiver	1	v		
55.	Tang	1	v		
56.	Alat Processing Lain-lain	2	v		
57.	Alat Pengemas Makanan	2	v		
58.	Mesin Kontrol/Jaga	8	v		
59.	Brankas	1			
60.	Meja Panjang	2	v		
61.	Meja Biro	2	v		V
62.	Oven Listrik	2	v		
63.	Tabung Gas	2	v		
64.	Dispenser	1	v		
65.	Alat Penggiling Daging	3	3		
66.	Mesin Jahit	37	36	1	
67.	Tangga Alumunium	1	v		
68.	Tong Sampah	2	v		
69.	Tabung Pemadam	1	v	V	
70.	Scanner	1	v		
71.	Hardisk Eksternal	7	7		
72.	Pressure Gauge	2	v		
73.	Water Jet Spray	1	V		
74.	Mixer	2	2		2
75.	Mesin Jahit Pasangan Kancing	2	V		
76.	Mesin Jahit 3 Pasha	1	v		
77.	Lead Detector	2	v		
78.	Meja PNS Non Struktural	2	v		
79.	Mesin Bor	4	v		
80.	Mesin Proses Lain (Pengolah Batu Akik)	2	v		
81.	Modem	1	v		
82.	Mixer	1	v		
83.	Papan Tulis	5	v		
84.	Software	4	v		
85.	PC Server	1	v		
86.	Food Prosesor	2	v		
87.	Oven Gas	1	v		
88.	Sealer	6	v		
89.	Pancai Presto	1	v		

90	Pisau Set	8	v		
91	Frezer Kulkas	2	v		
92	Meja Konter	1	v		
93	Bangku Tunggu	4	v		
94	Lemari 3 Pintu	1	v		
95	Rak Kayu	5	v		
96	Gantungan Kain	5	v		
97	Meja Rapat	40	v		5
98	Kursi Rapat	25	v		
99	Cermin	3	v		
100	Lemari Etalase	3	v		
101	Manekin Fullbody	5	v		
102	Manekin Halfbody	5	v		
103	Rangka Spanduk	1	v		
104	Kursi Tunggu	2	v		
105	Vacum Cleaner	1	v		
106	Karpet	10	v		
107	Televisi 43 inc	1	v		
108	Televisi 55 inc	1	v		
109	Handy Talky	5	v		
110	Kursi Kerja Instruktur	20	v		
111	Meja Kerja Instruktur	9	v		
112	Kursi Rapat BLK	56	v		
113	Mesin Las	2	v		
114	Mobil EXPO	1	v		
115	CCTV	2	v		
116	Lampu Pipa	1	v		
117	Leter Box	1	v		
118	Neon Box	2	v		
119	Showcase	2	v		
120	Sliding Flat Glass	2	v		
121	Tanah Persil Lainnya	180.000 m ²			
122	Tanah untuk Jalan Lainnya	260.000 m ²			
123	Tanah Kampung	5.414 m ²			
124	Rumah Kemasan	1	v		

Tabel 1.1 Gambaran Sarana dan Prasarana Tahun 2021

d) Data Statistik

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan ini melaksanakan tentang ketenagakerjaan dan perindustrian, adapun Data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas (Latas)

Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan tenaga kerja meliputi standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas.

Kinerja Pelayanan Seksi Pelatihan dan Produktivitas pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**REKAPITULASI DATA PENINGKATAN KUALITAS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT
KEADAAN JANUARI s/d DESEMBER 2021**

NO	LEMBAGA PENYELENGGARA	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA (Org)			JUMLAH KELULUSAN (Org)		SUMBER DANA	KETERANGAN
			L	P	JUMLAH	PELATIHAN / PEMAGANGAN	UJI KOMPETENSI		
1	BBPLK	PBK Institutional Boarding	0	0		0	0		
2	BLK PELAIHARI	PBK Institutional non Boarding	162	126	288	288	272	APBN	18 Paket
		Pelatihan yang dilaksanakan di Desa	181	235	416	416	0	APBD	26 Paket
JUMLAH			343	361	704	704	272		
3	BLK KOMUNITAS	PBK Institutional Non Boarding	18	46	64	64	64	APBN	4 Paket
4	LPK SWASTA	PBK Institutional Boarding	207	509	716	697	51		
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kal-Sel	Pemagangan dalam negeri	18	2	20	20	20	APBN	2 Paket (Pelaksananya Perusahaan di Kab. Tanah
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Pemagangan dalam negeri	7	3	10	10	10	APBD	1 Paket
JUMLAH PBK			412	686	1098	1079	417		
JUMLAH PBK & PELATIHAN DI DESA OLEH BLK PELAIHARI			593	921	1514	1495	417		

Tabel 1.2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian target Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu Pelatihan 500 orang siap kerja per tahun untuk Tahun 2021 telah dilampaui.

b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja (Penta)

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penempatan tenaga kerja meliputi pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

Pelayanan penempatan tenaga kerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**REKAPITULASI DATA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA S.D DESEMBER 2021**

NO	URAIAN	BULAN SEBELUMNYA			BULAN INI						S.D BULAN INI		
					BERTAMBAH			BERKURANG					
		L	P	JUMLAH PER TAHUN	L	P	JUMLAH PER TAHUN	L	P	JUMLAH PER TAHUN	L	P	JUMLAH PER TAHUN
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12=(3+6)-9	13=(4+7)-10	14=12+13
A	PENCARI KERJA	2.127	1.038	3.165	36	24	60	120	44	164	2.043	1.018	3.061
B	LOWONGAN KERJA	149	64	213	15	7	22	0	0	0	164	71	235
C	PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI (PTKDN)	63	71	134	60	22	82	0	0	0	123	93	216
D	PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI/ PMI	0	2	2	2	0	2	0	0	0	2	2	4
E	TENAGA KERJA ASING (TKA)	46	2	48	7	0	7	0	0	0	53	2	55

Tabel 1.3

a. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja (Luasja)

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang perluasan kesempatan kerja meliputi pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan pemberdayaan tenaga kerja mandiri.

Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**REKAPITULASI DATA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT
KEADAAN s/d DESEMBER 2021**

Lembaga Penyelenggara	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta (Org)			Anggaran	Keterangan
		L	P	JUMLAH		
A. PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN						
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	1. Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	11	9	20	APBD	Dilaksanakan tanggal 21 s.d 22 Sept 2021 di Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur
	Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	8	12	20	APBD	Dilaksanakan tanggal 13 s.d 14 Okt 2021 di Kecamatan Jorong
	Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	11	9	20	APBD	Dilaksanakan tanggal 26 s.d 27 Okt 2021 di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau
	JUMLAH	30	30	60		
	2. Sosialisasi Penumbuhan Wira Usaha Baru bersama Tim Mitra Tala Preneur dalam Manunggal Tuntung Pandang Tahun 2021	11	6	17	-	Dilaksanakan tanggal 26 Maret 2021 di Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari
		10	8	18	-	Dilaksanakan tanggal 07 April 2021 di Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar
		17	4	21	-	Dilaksanakan tanggal 16 April 2021 di Desa Raden Kecamatan Kurau
		14	5	19	-	Dilaksanakan tanggal 23 April 2021 di Desa Galam Kecamatan Bajuin
		12	1	13	-	Dilaksanakan tanggal 30 April 2021 di Desa Asri Mulia Kecamatan Jorong
		13	3	16	-	Dilaksanakan tanggal 28 Mei 2021 di Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur
		1	15	16	-	Dilaksanakan tanggal 04 Juni 2021 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati
		7	3	10	-	Dilaksanakan tanggal 11 Juni 2021 di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung
		11	2	13	-	Dilaksanakan tanggal 18 Juni 2021 di Desa Batu Mulya Kecamatan Penyipatan
		6	9	15	-	Dilaksanakan tanggal 25 Juni 2021 di Desa Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang

		10	5	15	-	Dilaksanakan tanggal 02 Juli 2021 di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin
		8	3	11	-	Dilaksanakan tanggal 09 Juli 2021 di Desa Kintap Kecamatan Kintap
		10	4	14	-	Dilaksanakan tanggal 16 Juli 2021 di Desa Padang Luas Kecamatan Kurau
		0	20	20	-	Dilaksanakan tanggal 30 September 2021 di Desa Swarangan Kecamatan Jorong
		9	4	13	-	Dilaksanakan tanggal 08 Oktober 2021 di Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar
		7	7	14	-	Dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2021 di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur
		4	8	12	-	Dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2021 di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung
		2	8	10	-	Dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2021 di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati
		3	15	18	-	Dilaksanakan tanggal 05 November 2021 di Desa Alur Kecamatan Jorong
		6	2	8	-	Dilaksanakan tanggal 12 November 2021 di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan
		4	10	14	-	Dilaksanakan tanggal 19 November 2021 di Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap
		13	1	14	-	Dilaksanakan tanggal 26 November 2021 di Desa Handil Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur
		5	12	17	-	Dilaksanakan tanggal 03 Desember 2021 di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar
		8	11	19	-	Dilaksanakan tanggal 10 Desember 2021 di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati
	JUMLAH	191	166	357		
	JUMLAH 1 & 2	221	196	417		
B. PENYUSUNAN RTKD						
		0	0	0	APBD	Kegiatan 1 (satu) kali Rapat FGD Pra-Finalisasi
-		0	0	0	APBD	Kegiatan 1 (satu) kali Rapat Ekspose RTK Kab.Tanah Laut Tahun 2021-2024
	JUMLAH	0	0	0		
C. PELATIHAN PEMBERDAYAAN BAGI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)						
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	Pelatihan Pembuatan Dodol	0	20	20	APBD	Dilaksanakan tanggal 3 s.d 4 November 2021 di Kecamatan Panyipatan
-	Pelatihan Pembuatan Roti	0	20	20	APBD	Dilaksanakan tanggal 17 s.d 18 November 2021 di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati
	JUMLAH	0	40	40		
	TOTAL	221	236	457		

Tabel 1.4

2. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Seksi Persyaratan Kerja

Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang persyaratan kerja meliputi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, hubungan kerja, kesetaraan syarat kerja, dan kesejahteraan pekerja, diantara statistik hasil kerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN					
TAHUN 2021					
No	Tanggal/Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Kepala Dinas	Keterangan Kode Kertas
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	PT.Cheiljedang Feed Kalimantan	Jl.A.Yani Km.48 Desa Banyu Irang Kec.Bati-Bati	047 Tahun 2021	SYAKER 1005-1006 SYAKER 1007-1008
6	Juni	PT. Tirta Sukses Perkasa	Jl. A Yani Km 36, Kec. Bati-Bati	51 Tahun 2021	SYAKER 1032-1034
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	08 September	PT. Panen Embun Kemakmuran	Jl. A Yani Km.33, Ds. Nusa Indah, Kec. Bati-Bati	053 Tahun 2021	SYAKER 1212-1214
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	PT. Candi Artha	Ds. Jilatan Kec. Batu Ampar	057 Tahun 2021	SYAKER 039-041
12	November	PT. Lunik Anugerah	Ds. Sabuhur Kecamatan Jorong	056 Tahun 2021	SYAKER 032-034
13	Desember	PT. Mitra Citra Gemilang	DS. Nusa Indah, Kec. Bati-Bati	882 Tahun 2021	SYAKER 068-070

Tabel 1.5

PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA						
TAHUN 2021						
No	Tanggal dan Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor SK Pendaftaran	Jangka Waktu	Keterangan
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	Jl. A Yani Km. 32, Ds. Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	054/DTKP/HIJSTK-PK/IX/2021	1 (satu) tahun	Perpanjangan 1x karena blm ada kesepakatan dg SP/SB
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-

Tabel 1.6

PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN						
TAHUN 2021						
No	Tanggal Pencatatan	Nama Perusahaan Penyedia Jasa	Alamat	Nomor Pendaftaran	Perusahaan Pemberi Kerja	Keterangan
1	Januari	PT.PLN Tarakan	Jl.RE.Martadinata No.36 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	010/DTKP/HIJSTK-PK/I/2021	PT.PLN (Persero) UP3 Banjarmasin	
2	Februari	PT.PLN Tarakan	Jl.RE.Martadinata No.36 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	065/DTKP/HIJSTK-PK/II/2021	PT.PLN (persero) UIKL Kalimantan	
3	Maret	-	-	-	-	
4	April	PT.Shelter Nusa Indah	Jl.Semampir Selatan V-A/18 Surabaya	065/DTKP/HIJSTK-PK/III/2021	PT.Ciomas Adisatwa	
5	Mei	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	-	
8	Agustus	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	
11	November	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	-	

Tabel 1.7

PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG						
TAHUN 2021						
No	Tanggal Pencatatan	Nama Perusahaan Pemberi Kerja	Alamat	Asosiasi Perusahaan	Nomor Bukti Pelaporan	Nama Perusahaan Penyedia Jasa
1	Januari	PT.PLN (persero) UP3 Banjarmasin	Jl.Lambung Mangkurat No.12 Banjarmasin	APPELIN	560.009/DTKP/HIJSTK-PK/I/2021	PT.PLN Tarakan
2	Februari	PT.PLN (persero) UIKL Kalimantan	Jl.Panglima Batur Barat No.1 Banjarbaru	APPELIN	560.064/DTKP/HIJSTK-PK/II/2021	PT.PLN Tarakan
3	Februari	PT.Ciomas Adisatwa	Jl.A.Yani Km.37 RT.01 Desa Ujung Baru	ARPUIN	560.099/DTKP/HIJSTK-PK/II/2021	PT.SHELTER NUSA INDAH
4	Maret	PT.Tirta Sukses Perkasa	Jl.A.Yani Km.36 Desa Ujung Baru	ASPADIN	560.170/DTKP/HIJSTK-PK/III/2021	PT.PRIMA MAKMUR
5	April	PT.Tirta Sukses Perkasa	Jl.A.Yani Km.36 Desa Ujung Baru	ASPADIN	560.170/DTKP/HIJSTK-PK/IV/2021	PT.SUMBERDAYA DIAN MANDIRI
6	Mei	-	-	-	-	-
7	Juni	-	-	-	-	-
8	Juli	-	-	-	-	-
9	Agustus	-	-	-	-	-
10	September	-	-	-	-	-
11	Oktober	-	-	-	-	-
12	November	-	-	-	-	-
13	Desember	-	-	-	-	-

Tabel 1.8

PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)						
TAHUN 2021						
No	Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Register	Jangka Waktu	Keterangan
1	Januari	PT.Smart Tbk	Kintap	01-06	1 tahun	6 orang
2	Januari	BUT.Hyundai Engineering Co.Ltd	Jorong	07	1 tahun	1 orang
3	Januari	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	08-015	2 bulan	8 orang
4	Januari	PT.Panen Embun Kemakmuran	Bati-Bati	016-023	1 tahun	8 orang
5	Januari	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	024-054	1 tahun	31 orang
6	Januari	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	055-071	1 tahun	17 orang
7	Januari	PT.Smart TLTE	Kintap	073-091	1 tahun	19 orang
8	Januari	PT.Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	092-096	1 tahun	5 orang
9	Januari	PT.Gawi Makmur Kalimantan Kebun Barat	Jorong	097-126	1 tahun	30 orang
10	Januari	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	127-144	1 tahun	18 orang
11	Februari	PT.Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah	Damit	145-236	1 tahun	92 orang
12	Februari	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	237-239	1 tahun	3 orang
13	Februari	BUT.Hyundai Engineering Co.Ltd	Jorong	240-242	6 bulan s.d 1 tahun	3 orang
14	Februari	PT.Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	243-246	1 tahun	4 orang
15	Februari	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Jorong	247-266	1 tahun	20 orang
16	Februari	PT.Sinar Nusantara Industries	Bati-Bati	267-302	2 tahun	36 orang
17	Februari	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	303-319	3 tahun	17 orang
18	Februari	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	320-350	2 s.d 6 bulan	31 orang
19	Februari	BUT.Hyundai Engineering Co.Ltd	Asam-Asam	351-354	1 tahun	4 orang
20	Februari	PT.Smart Tbk	Kintap	355-359	1 tahun	5 orang
21	Februari	PT.GMK Estate Timur	Kintap	360	1 tahun	521 orang
22	Maret	PT.Pribumi Citra Megah Utama	Jorong	361-371	1 tahun	11 orang
23	Maret	PT.Panen Embun Kemakmuran	Bati-Bati	372-397	2 tahun	26 orang
24	Maret	BUT.Hyundai Engineering Co.Ltd	Jorong	398-403	1 tahun	6 orang
25	Maret	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	404-417	1 tahun	14 orang
26	Maret	PT.Patriot Intan Abadi	Pulau Sari	418-431	1 tahun	14 orang
27	Maret	PT.Patriot Intan Abadi	Pulau Sari	432-443	1 tahun	12 orang
28	Maret	BUT.Hyundai Engineering Co.Ltd	Jorong	444	1 tahun	1 orang
29	Maret	PT.Mandiri Karya Kirana	Bati-Bati	445-446	1 tahun	208 orang
30	Maret	PT.Smart Tbk	Kintap	447-448	1 tahun	2 orang
31	Maret	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	449-460	2 bulan	12 orang
32	Maret	PT.Pribumi Citra Megah Utama	Jorong	461-467	6 bulan	7 orang
33	April	PT.Patriot Intan Abadi	Tambang Ulang	468-479	1 tahun	12 orang
34	April	PT.Japfa	Bati-Bati	480-495	1 tahun	16 orang
35	April	PT.Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	496-505	1 tahun	10 orang
36	April	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	506-548	6 bulan s.d 1 tahun	43 orang
37	April	PT.Smart TLTE	Kintap	549-583	1 tahun	35 orang
38	April	PT.Patriot Intan Abadi	Pulau Sari	584-592	1 tahun	9 orang

39	April	PT.Gawi Makmur Kalimantan	Damit	593-614	1 tahun	22	orang
40	Mei	PT.Japfa Comfeed	Bati-Bati	615-616	1 tahun	2	orang
41	Mei	PT.Timur Satria Perkasa	Kintap	617-622	1 tahun	6	orang
42	Mei	PT.Hokkan	Bati-Bati	623-643	1 tahun	21	orang
43	Mei	PT.Patriot Intan Abadi	Bati-Bati	644-655	1 tahun	12	orang
44	Mei	PT.Smart TLTE	Kintap	656-660	1 tahun	5	orang
45	Mei	PT.Smart	Kintap	661-669	1 tahun	9	orang
46	Mei	BUT.Hyundai Engineering Co.Ltd	Jorong	670-673	1 tahun	4	orang
47	Mei	PT.Pribumi Citra Megah Utama	Kintap	674-676	1 tahun	3	orang
48	Mei	PT.Patriot Intan Abadi	Pulau Sari	677-687	1 tahun	11	orang
49	Juni	PT. Timur Satria Perkasa	Kintap	688-767	2 bulan	80	orang
50	Juni	PT. Smart	Kintap	768-771	6 bulan s.d 1 tahun	4	orang

Tabel 1.9

PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) OUTSOURCING							
TAHUN 2021							
No	Bulan	Nama Perusahaan	Alamat	Nomor	Jangka Waktu	Keterangan	
1	Januari	-	-	-	-	0	orang
2	Februari	-	-	-	-	0	orang
3	Maret	-	-	-	-	0	orang
4	April	-	-	-	-	0	orang
5	Mei	-	-	-	-	0	orang
6	Juni	-	-	-	-	0	orang
7	Juli	-	-	-	-	0	orang
8	Agustus	-	-	-	-	0	orang
9	September	-	-	-	-	0	orang
10	Oktober	-	-	-	-	0	orang
11	November	-	-	-	-	0	orang
12	Desember	-	-	-	-	0	orang

Tabel 1.10

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi standarisasi dan fasilitasi pengupahan, pengembangan pengupahan, program jaminan sosial dan kepesertaan jaminan sosial, pada tahun 2021 dalam pelaksanaan tugasnya dapat tercermin pada tabel-tabel sebagai berikut :

INDEKS KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK KEPESERTAAN FORMAL				
	Dasar : Laporan BPJS Nomor B/1543/122021			
	Tanggal : Desember 2021			
No	Peserta BPJS	Jumlah	Satuan	Keterangan
	PEGAWAI PEMERINTAH NON ASN			
1	Sekretariat Daerah Kab. Tanah laut	140	Orang	
2	Sekretariat DPRD Kab. Tanah laut	35	Orang	
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tala	17	Orang	
4	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	18	Orang	
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut	79	Orang	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tala	94	Orang	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tala	17	Orang	
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tala	45	Orang	
9	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tala	22	Orang	
10	Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	16	Orang	
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tala	28	Orang	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34	Orang	
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut	205	Orang	
14	Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut	35	Orang	
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	17	Orang	
16	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut	49	Orang	
17	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	320	Orang	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	87	Orang	
19	Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	47	Orang	
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tala	14	Orang	
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1779	Orang	
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17	Orang	
23	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Kontrak)	2	Orang	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Orang	
25	Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut	14	Orang	
26	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah	14	Orang	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39	Orang	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	15	Orang	
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19	Orang	
30	Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	9	Orang	
31	RSUD Hadji Boedjasin	249	Orang	
32	RSUD Hadji Boedjasin BLUD	239	Orang	
33	RSUD KH. MANSYUR	120	Orang	
34	Balai Latihan Kerja Pelaihari	6	Orang	
35	Kecamatan Kurau Kab. Tanah Laut	6	Orang	
36	Kecamatan Jorong Kab. Tanah laut	6	Orang	

37	Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut	9	Orang	
38	Kecamatan Kintap Kab. Tanah Laut	9	Orang	
39	Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tala	5	Orang	
40	Kecamatan Bajuin Kab. Tanah Laut	7	Orang	
41	Kecamatan Bati-Bati Kab. Tanah Laut	6	Orang	
42	Kecamatan Panyipatan Kab. Tanah Laut	10	Orang	
43	Kecamatan Bumi Makmur Kab. Tanah Laut	7	Orang	
44	Kecamatan Batu Ampar Kab. Tanah Laut	6	Orang	
45	Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut	8	Orang	
46	Kelurahan Pabahanan	2	Orang	
47	Kelurahan Angsau	4	Orang	
48	Kelurahan Karang Taruna	3	Orang	
49	Kelurahan Pelaihari	3	Orang	
50	Kelurahan Sarang Halang	2	Orang	
51	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut PTT Prov.	47	Orang	
52	Dinas Pekerjaan Umum-Cipta Karya (Program Kotaku)	9	Orang	
53	Kementrian Agama Kantor Kab. Tanah Laut	9	Orang	
54	Palang Merah Indonesia Kab. Tanah Laut	9	Orang	
55	Penyuluh Sosial Masyarakat Kab. Tanah Laut	27	Orang	
	JUMLAH	4041	Orang	

	APARATUR PEMERINTAHAN DESA			
1	Desa Tabunio Kab. Tanah laut	9	Orang	
2	Kantor Desa Bumi Harapan	8	Orang	
3	Kantor Desa Handil Birayang Atas	9	Orang	
4	Kantor Desa Handil Gayam	9	Orang	
5	Kantor Desa Handil Maluka	11	Orang	
6	Kantor Desa Jilatan Alur	11	Orang	
7	Kantor Desa Kampung Baru	9	Orang	
8	Kantor Desa Martadah Baru	9	Orang	
9	Kantor Desa Sebamban Baru	9	Orang	
10	Kantor Desa Sumber Jaya	7	Orang	
11	Kantor Desa Sungai Bakau	8	Orang	
12	Kantor Desa Sungai Cuka	12	Orang	
13	Kantor Desa Sungai Jelai	9	Orang	
14	Kantor Desa Sungai Rasau	9	Orang	
15	Kantor Desa Sungai Riam	10	Orang	
16	Kantor Desa Tajau Pecah	13	Orang	
17	Kantor Desa Kandangan Lama	10	Orang	
18	Kantor Desa Tambak Sarinah	14	Orang	
19	Kantor Desa Damit	11	Orang	
20	Kantor Desa Bukit Mulia	11	Orang	

21	Kantor Desa Gunung Mas	11	Orang	
22	Kantor Desa Raden	8	Orang	
23	Kantor Desa Gunung Raja	9	Orang	
24	Kantor Desa Tanjung	11	Orang	
	JUMLAH	237		
	PEMBERI KERJA AKTIF			
1	Pemberi Kerja Bukan Penyelenggara Negara	14625	Orang	371 Badan Usaha, 55 Penyelenggara Negara, 24 Aparatur Desa
2	Pemberi Kerja Penyelenggara Negara	4041		
3	Aparatur Desa	237		
	JUMLAH	18903	Orang	55 Penyelenggara Negara, 24 Aparatur Desa
1	PEKERJA RUMAH TANGGA	0	Orang	
	JUMLAH	0	Orang	
TOTAL		19140	Orang	

	PEKERJA JASA KONSTRUKSI			
1		820	Proyek Jaskon	
	JUMLAH	820	Proyek Jaskon	

Tabel 1.11

**INDEKS KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK
KEPESERTAAN INFORMAL**

No	Instansi	Jumlah	Satuan	Keterangan
	PEMBERI KERJA			
1		0	Orang	
	JUMLAH	0	Orang	
	PEKERJA MANDIRI/BUKAN PENERIMA UPAH			
1		1718	Orang	
	JUMLAH	1718	Orang	
TOTAL		1718	Orang	

Tabel 1.12

c. Seksi Hubungan Industrial

Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial meliputi pemberdayaan organisasi pekerja dan pengusaha, kelembagaan hubungan industrial, kerjasama dan pemasyarakatan hubungan industrial, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemberdayaan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mediator, pada tahun 2021 dalam pelaksanaan tugasnya dapat tercermin pada tabel-tabel sebagai berikut :

**DATA JUMLAH LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT
TAHUN 2021**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NOMOR BUKTI PENCATATAN	KETERANGAN
1	PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Banjarmasin	Jl. Raya Nusa Indah RT/RW 005/002 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	568.02/01/DTKP/HIJSTK-HI/LKS-B/20.02	tanggal pencatatan 15 Februari 2021
2	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Poultry Breeding Division Unit Hatchery	Jl. A. Yani Km. 30,7 RT. 03 RW. 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut	568.02/03/DTKP/HIJSTK-HI/LKS-B/21.04	tanggal 19 April 2021
3	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Barat	Desa Damit Hulu RT. 017 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Kode Pos 70882	568.02/02/DTKP/HIJSTK-HI/LKS-B/21.04	tanggal 15 April 2021
4	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Poultry Breeding Division Unit Farm 30 Tambang Ulang I	Jl. Guntung Rasak RT. 06 RW. 03 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	004/LKS-B/IX/2019	tanggal 30 September 2019 dan dicatatan kembali tanggal 15 Juni 2021
5	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Poultry Breeding Division Unit Farm 38 Tambang Ulang II	RT. 01 RW. 01 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut	568.02/04/DTKP/HIJSTK-HI/LKS-B/21.06	tanggal 15 Juni 2021
6	PT. Smart Tbk. Perkebunan Tanah Laut	Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, 70883	568.02/05/DTKP/HIJSTK-HI/LKS-B/21.06	tanggal 16 Juni 2021
7	PT. Anugerah Emas Alihdaya	Jalan A. Yani Km. 123 Perum Widya Citra Graha Blok B No. 9 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	568.02/06/DTKP/HIJSTK-HI/LKS-B/21.06	tanggal 17 Juni 2021
8	PT. Kalimantan Prima Persada Distrik MASS	Jalan Hauling A3M Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	568.02/07/DTKP/HIJSTK-HI/LKS-B/21.09	Tanggal Pencatatan 15 September 2021

9	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 32 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut	005/LKS-B/XI/2019	Tanggal Pencatatan 15 November 2019 dan Tanggal Pencatatan Kembali 22 September 2021
10	PT. Panen Embun Kemakmuran	Jl. A. Yani Km. 33 RT. 010 RW. 002 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	568.02/08/DTKP/HIJSTK-HI/LKS-B/21.12	Tanggal Pencatatan 2 Desember 2021
TOTAL			10	

Tabel 1.13

**DATA JUMLAH SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH (SP/SB)
TAHUN 2021**

NO.	NAMA SP/SB/ PERUSAHAAN	ALAMAT	JARINGAN ORGANISASI				TERGABUNG DALAM FEDERASI/KONFEDERASI		NONOR BUKTI PENCATATAN	KETERANGAN
			MANDIRI		BERAFILIASI		FEDERASI	KONFEDERASI		
			DALAM HUBUNGAN KERJA	LUAR HUBUNGAN KERJA	DALAM HUBUNGAN KERJA	LUAR HUBUNGAN KERJA				
1	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Kintap Jaya Wattindo	Desa Tebing Siring 2 RT 11 Dusun 3 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan			✓		Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia		568.01/01/DTKP/HIJS TK-HI/SPSB/21.05	Tanggal Pencatatan 3 Mei 2021
2	Serikat Pekerja Mandiri PT. Darma Henwa - ACP	Jl. A. Yani Km. 121,5 Dusun 3 RT. 21 No. 21 Desa Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	✓						05/DTKTS/HIPK/III/2016	Tanggal 23 Maret 2016 dan dicatitkan kembali tanggal 29 Juni 2021
3	Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Banjarmasin	Jl. A. Yani Km. 32 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan			✓			KSBSI	66/Penc/SP/SB/I/Dis nakertranssos	Tanggal 25 Januari 2011 dan dicatitkan kembali tanggal 22 September 2021
4	Pengurus Unit Kerja Serikat Buruh Nasional Indonesia PT. Sukses Wijaya Adimakmur	Jl. A. Yani Km. 33,5 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan			✓			DPD Serikat Buruh Nasional Indonesia	568.01/02/DTKP/HIJS TK-HI/SPSB/21.09	Tanggal Pencatatan 28 September 2021
5	Pengurus Unit Kerja Serikat Buruh Nasional Indonesia PT. Sarana Subur Agrindotama	Desa Alur RT. 09 RW. 02 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan			✓			DPD Serikat Buruh Nasional Indonesia	568.01/03/DTKP/HIJS TK-HI/SPSB/21.10	Tanggal Pencatatan 27 Oktober 2021
TOTAL									5	

Tabel 1.14

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdri. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdri. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdri. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2

Tabel 1.15

**DATA JUMLAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
TAHUN 2021**

No.	Perusahaan	Bidang Usaha	Alasan PHK	Alamat Perusahaan (Kecamatan)	Jumlah PHK (Orang)
1	PT. Thiess Contractors Indonesia	Pertambangan	PHK	Kintap	90
2	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk	Perbankan	PHK	Pelaihari	4
3	PT. Thiess Contractors Indonesia	Pertambangan	PHK	Kintap	175
4	PT. Jorong Barutama Grestone	Pertambangan	PHK	Pelaihari	3
TOTAL					272

Tabel 1.16

2. Bidang Perindustrian

a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan sumber daya industri, pemanfaatan sumber daya alam, dan pengembangan teknologi industri, pada tahun 2021 secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

1. Data Statistik Penambahan Jumlah IKM dan Masyarakat yang Mendapatkan Pelatihan dan Pemagangan

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah peserta pelatihan	0	0	0	20	0	40	20	0	0	4	0	0
Kumulatif penambahan jumlah peserta pelatihan dan pemagangan Tahun 2021	0	0	0	20	20	60	80	80	80	84	84	84

Tabel 1.17

2. Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang Menggunakan Inovasi Teknologi dalam Kegiatan Produksi

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah IKM	0	0	5	0	0	0	0	0	9	0	10	0
Kumulatif Penambahan Jumlah IKM Pengguna Inovasi Teknologi Tahun 2021	0	0	5	5	5	5	5	5	14	14	24	24

Tabel 1.18

3. Data Statistik Penambahan Jumlah IKM yang Meningkatkan Kreatifitas Desain Produknya

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah IKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
Kumulatif Penambahan Jumlah IKM yang Meningkatkan Kreatifitas Produknya Tahun 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28

Tabel 1.19

b. Seksi Sarana dan Prasarana Industri

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan industry kecil dan industri menengah, fasilitasi industri,

industri hijau dan standarisasi industri, dan pengolahan data dan informasi industri, pada tahun 2021 secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

1. Data Statistik Jumlah Kumulatif IKM

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
- Jumlah IKM	3378,00	3378,00	3378,00	3378,00	3378,00	3378,00	3378,00	3378,00	3378,00	3378,00	3378,00	3458,00

Tabel 1.20

Jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3458 atau

2. Data Statistik Jumlah Perusahaan dalam SIINAS Tanah laut

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah Industri	26	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Jumlah Industri Kumulatif	26	26,00	28,00	28,00	29,00	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	31,00

bertambah sebanyak 80 IKM di tahun 2021.

Tabel 1.21

3. Data Statistik Rekomendasi Perizinan Industri yang diterbitkan

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
- Rekomendasi IUI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 1.22

4. Data Statistik Fasilitas Perizinan IUMK OSS

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah IUMK OSS	28	3	8	15	10	7	4	3	0	3	0	0
Jumlah TOTAL IUMK OSS	28,00	31,00	39,00	54,00	64,00	71,00	75,00	78,00	78,00	81,00	81,00	81,00

Tabel 1.23

c. Seksi Pemberdayaan Industri

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang kerjasama, pengawasan perizinan dan pengendalian, dan promosi investasi

industri yang pada tahun 2021 secara singkat dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. Data Statistik Penjualan Produk IKM di Dekranasda

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Total Penjualan	18605000	0	0	16132000	16195000	12143000	19621000	10263000	6202000	23362000	7733000	7408000

Tabel 1.24

2. Data Statistik Penjualan Produk IKM di Gedung Pusat Promosi

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Total Penjualan	2815000	0	0	6290000	3947000	18852000	10802000	3592000	2784000	7192000	6928000	8942000

Tabel 1.25

3. Data Statistik Jumlah Pameran IKM

	Month											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah Pameran	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0

Tabel 1.26

3. UPT Balai Latihan Kerja

UPT BLK melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam hal Pelatihan Berbasis Kompetensi, data statistic di Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

NO.	NAMA INSTANSI	JENIS PELAYANAN PELATIHAN		KETERANGAN
		JENIS PELATIHAN	KEJURUAN	
1	UPT. Balai Latihan Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja Siap	1 Menjahit	4 Paket
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	2 Teknik Otomotif (Sepeda Motor Injeksi)	2 Paket
		Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan	3 Processing (Pembuatan Roti)	3 Paket
		Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan	4 Processing (Pembuatan Hasil Perikanan)	2 Paket
		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari	5 Teknik Las	1 Paket
		Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	6 Bangunan (Furniture Aluminium)	2 Paket
			7 TIK (Pengoperasian Komputer Dasar)	2 Paket
			8 Tata Rias	3 Paket
			9 Teknik Pemasangan Baja Ringan	2 Paket
			10 Desain Grafis	2 Paket
			11 Teknik AC	1 Paket
			12 TIK (Sablon)	2 Paket

			Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Non Boarding	1	Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue	3 Paket
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kegiatan	2	Pelatihan Desain Grafis Muda	1 Paket
			Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan	3	Pelatihan Cinematography	0 Paket
			Pelatihan Kerja Sub Pelatihan Berbasis Kompetensi	4	Pelatihan Pengoperasian Komputer Dasar	1 Paket
				5	Pelatihan Servis Sepeda Motor Injeksi	2 Paket
				6	Pelatihan Pemasangan Baja Ringan	2 Paket
				7	Pelatihan Mengerjakan Finishing Teknik Sempro	1 Paket
				8	Pelatihan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	1 Paket
				9	Pelatihan Teknik AC Residential	1 Paket
				10	Pelatihan Menjahit Pakaian Dengan Mesin	3 Paket
				11	Pelatihan Plate Welder SMAW 3G-UPPF	2 Paket
				12	Pelatihan Penata Rambut	1 Paket
				JUMLAH		18 Paket (288 Orang)

Tabel 1.27

e) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Wajib (Bidang Ketenagakerjaan)

a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Perencanaan pada Rencana Kerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2021 telah sesuai dan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

b. Program Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

2) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA :

a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

c) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

3) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelayanan antar Kerja
2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

3. Perluasan Kesempatan Kerja
- b) **Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
- c) **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
 1. Job Fair/Bursa Kerja
- d) **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
- 5) **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**
 - a) **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b) **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada urusan Bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
A	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		49.999.700	40.398.200	80,80
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	49.999.700	40.398.200	80,80
		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	49.999.700	40.398.200
B	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		494.203.352	379.172.816	76,72
	1	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	49.999.900	39.589.900	79,18
		1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	49.999.900	39.589.900
	2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	
		1	Job Fair/Bursa Kerja	-	-
	3	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	441.166.652	337.487.316	76,50
		1	Pelayanan antar Kerja	197.999.376	131.652.566

	2	Perluasan Kesempatan Kerja	193.167.576	166.183.850	86,03
	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	49.999.700	39.650.900	79,30
	4	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.036.800	2.095.600	69,01
	1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.036.800	2.095.600	69,01
C	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		741.370.376	596.724.110	80,49
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	495.842.700	459.283.960	92,63
	1	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	95.852.800	78.695.900	82,10
	2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	399.989.900	380.588.060	95,15
	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	150.430.000	94.569.700	62,87
	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	150.430.000	94.569.700	62,87
	3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	95.097.676	42.870.450	45,08
	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	95.097.676	42.870.450	45,08
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		193.999.586	149.254.546	76,94
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.999.690	68.183.300	71,77
	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	32.499.830	17.225.900	53,00
	2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	62.499.860	50.957.400	81,53
	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	98.999.896	81.071.246	81,89
	1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	98.999.896	81.071.246	81,89
Jumlah			1.479.573.014	1.165.549.672	78,78

Tabel 2.1

d. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- Belum terpenuhinya standar kompetensi tenaga kerja lokal.
- Belum maksimalnya pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Masih terdapatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Solusi :

- Peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan kewirausahaan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif

- Peningkatan Pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- Peningkatan jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).

2. Urusan Pilihan (Bidang Perindustrian)

a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Perencanaan pada Rencana Kerja Bidang Perindustrian Tahun 2021 telah sesuai dan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

b. Program Kegiatan

Program dan Kegiatan pada urusan pilihan Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
5. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

2) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

a) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran pada urusan Bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		3.176.861.614	2.873.719.058	90,46
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		3.176.861.614	2.873.719.058	90,46
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1.915.136.209	1.851.015.039	96,65
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		388.670.546	354.805.804	91,29
3	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		8.484.800	7.506.000	88,46
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		76.000.000	32.731.300	43,07
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		788.570.059	627.660.915	79,59
B	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		124.999.750	113.741.600	90,99
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		124.999.750	113.741.600	90,99
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		124.999.750	113.741.600	90,99
Jumlah			3.301.861.364	2.987.460.658	90,48

Tabel 2.2

d. Permasalahan dan Solusi

2. Permasalahan :

- Sektor industri belum tertata secara maksimal.
- Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah.

2. Solusi :

- Penataan sektor industri
- Peningkatan pertumbuhan industri kecil menengah

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kesekretariatan)

a. Kesesuaian perencanaan pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Perencanaan pada Rencana Kerja Kesekretariatan Tahun 2021 telah sesuai dan selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

b. Program Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Kesekretariatan adalah sebagai berikut :

DINAS

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

a) **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

d) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e) **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

1. Pengamanan Barang Milik Daerah

f) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

UPT. BLK

1) PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

a) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

b) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Pengamanan Barang Milik Daerah

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Mebel

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesekretariatan dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

b. DINAS

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.876.109.723	6.556.311.171	66,39
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.934.258	72.687.386	97,00
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	74.934.258	72.687.386	97,00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.485.160	39.465.400	99,95
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.485.160	39.465.400	99,95
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.716.900	290.392.170	93,46
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.319.400	12.277.900	99,66
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.303.700	35.678.595	84,34
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.949.800	9.388.500	85,74
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.965.600	2.160.000	31,01
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.183.400	22.008.400	94,93
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.995.000	208.878.775	97,16
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.751.720	134.581.363	94,94
1	Pengadaan Mebel	45.148.620	44.000.000	97,46
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.603.100	90.581.363	93,77
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.151.668	207.666.823	82,03
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.433.076	25.637.701	90,17
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.895.916	145.535.772	77,46
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.445.000	5.280.000	96,97
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.377.676	31.213.350	99,48

	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.640.431	285.993.197	96,74
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.673.376	106.626.300	97,22
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.281.115	140.936.237	98,36
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.445.000	19.600.000	87,32
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.240.940	18.830.660	93,03
	7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.755.537	43.623.950	60,80
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.700	6.793.700	67,94
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.999.676	31.830.250	90,94
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.756.161	5.000.000	18,69
	8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.688.674.049	5.481.900.882	63,09
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.632.506.573	5.430.499.632	62,91
	2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	56.167.476	51.401.250	91,51
	Jumlah			9.876.109.723	6.556.311.171

c. UPT. BLK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	737.199.344	676.588.459	91,8
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.966.676	23.797.611	99,3
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.966.676	23.797.611	99,3
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.872.650	112.673.300	91,7
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.516.000	5.785.500	88,8
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.858.850	9.576.500	74,5
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.428.200	92,9
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.132.800	1.080.000	95,3
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.200.000	3.690.000	59,5
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.165.000	85.113.100	96,5
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.086.978	103.794.845	83,6
1	Pengadaan Mebel	101.786.630	86.009.000	84,5
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.300.348	17.785.845	79,8
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.177.740	230.958.867	93,4
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.994.476	23.745.611	99
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.199.390	42.284.570	41

	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.994.922	69.314.224	96,3
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.988.952	47.807.231	99,6
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		219.095.300	205.363.836	93,7
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.567.500	62.090.336	97,7
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.600.000	14.450.000	70,1
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.979.800	119.646.000	84,5
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.948.000	9.177.500	92,3
Jumlah			737.199.344	676.588.459	91,8

Tabel 2.3

d. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ada permasalahan pada pencapaian kinerja bidang Kesekretariatan.

4. Urusan Pemerintahan Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi memberikan Tugas Pembantuan kepada Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 18 Paket kejuruan selama Tahun 2021.

a. Dasar Hukum

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka peran dan fungsi pemerintah pusat telah bergeser. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak lagi berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana tetapi bergeser menjadi regulator, mediator, motivator dan fasilitator. Konsekwensi logis dari perubahan ini adalah sistem dan mekanisme kerjasama antar lembaga pelatihan dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip saling ketergantungan positif, saling menguntungkan dalam mewujudkan otonominya masing-masing. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja perlu menempatkan pencari kerja, para penganggur maupun tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan/ skill nya sebagai pelaku utama perlu program yang terpadu, sinergi dan relevan agar sumber daya pelatihan dapat berjalan dengan optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja sehingga dapat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat yang memerlukan skill untuk terjun ke dunia kerja baik di industry maupun berwirausaha mandiri, skill sebagai modal dasar maupun penunjang dalam menggali sumber-sumber ekonomi di lingkungannya juga perlu dibekali dengan inovasi pengetahuan, keterampilan, dorongan semangat serta motivasi, guna menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih mantap, sehingga akan timbul sikap positif pada diri pencari kerja untuk mandiri, inovatif, bersemangat, tidak mudah menyerah dan selalu berupaya untuk mengembangkan diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja bagi para pencari kerja, pengangguran dan tenaga kerja yang ingin meningkatkan kompetensi nya.

Pengembangan metode Pelatihan bersifat bottom up (berdasarkan aspirasi/ kebutuhan masyarakat) sangat tepat, karena akan lebih terarah pada usaha pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (Community Empowerment and Community Development). Karena dalam metode ini masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap program pelatihan (partisipatif) mulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan pelatihan, pelaksanaan tahap evaluasi pasca pelatihan maupun pendampingan. Upaya pembinaan masyarakat ini bersifat berkelanjutan, karena tujuan untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri tidak dapat dicapai seketika, memerlukan waktu yang lama.

Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diberi tugas dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Dana APBN Tahun Anggaran 2021, memiliki peran dalam pembangunan sumberdaya manusia melalui Pelatihan maupun peningkatan kemampuan, keterampilan/ skill dan kompetensi. Berkaitan dengan hal tersebut, di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan dan program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, selain itu juga dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia baik aparat pelaksana maupun tenaga kerja serta mengantisipasi kesenjangan kemampuan dan keterampilan, selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan / Dana Dekonsentrasi

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menjalankan peran dari sebagian unsur pemerintah dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu pada Tahun Anggaran 2021 Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan kegiatan sesuai TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang realisasinya sesuai dengan target yang telah direncanakan. Penyelenggaraan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dana Pemerintah yang dituangkan dalam DIPA Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi (BBPLK) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-026.13.2.452558/2021 Tanggal 16 Februari Nopember 2021, yang meliputi kegiatan administrasi maupun kegiatan-kegiatan operasional pelatihan Berbasis Kompetensi.

c. Program, Kegiatan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 rencana pelaksanaan kegiatan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut dapat diuraikan sebagai berikut:

Rencana Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut, meliputi kegiatan :

No	Jenis Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Paket	Jumlah Total Peserta (orang)	Waktu Pelaksanaan (hari)	Lokasi Pelaksanaan
	MAK 4060.072.003.051				
1.	Pembuatan Roti dan Kue	3 Paket	48 orang	66 hari	BLK Tanah Laut
2.	Teknisi AC	1 Paket	16 orang	38 hari	BLK Tanah Laut
3.	Pengoperasian Komputer Dasar	1 Paket	16 orang	38 hari	BLK Tanah Laut
4.	Mengerjakan Finishing dengan Teknis Semprot	1 Paket	16 orang	38 hari	BLK Tanah Laut
5.	Menjahit Pakaian dengan Mesin	3 Paket	48 orang	114 hari	BLK Tanah Laut
6.	Servis Sepeda Motor Injeksi	2 Paket	32 orang	98 hari	BLK Tanah Laut
7.	Plate Welder SMAW 3G-UP PF	2 Paket	32 orang	98 hari	BLK Tanah Laut
8.	Desain Grafis Muda	1 Paket	16 orang	38 hari	BLK Tanah Laut
9.	Pemasangan Baja Ringan	2 Paket	32 orang	72 hari	BLK Tanah Laut
10.	Pemasangan Instalasi Listrik Bagunan Sederhana.	1 Paket	16 orang	38 hari	BLK Tanah Laut
11.	Penata Rambut	1 Paket	16 orang	38 hari	BLK Tanah Laut
	JUMLAH	18 Paket	288 orang		

Tabel 3.1

d. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

sejauh ini sarana dan prasarana masih cukup memadai untuk digunakan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi walaupun sebagian work shop masih memerlukan peralatan yang lebih bagus lagi untuk menghasilkan peserta yang kompeten sesuai dengan misi BLK yaitu menghasilkan para manusia yang trampil dan kompeten.

Tahun 2022 BLK mendapatkan 15 paket pelatihan dengan satu kejuruan mendapatkan beberapa paket kegiatan, disini lah terdapat kendala karena peralatan dan workshop hanya dapat digunakan untuk satu orang instruktur saja sehingga pelatihan harus dilakukan beberapa tahap.

e. Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan

Dalam mendukung kegiatan Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut tersedia dana melalui DIPA Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-026.13.2.452558/2021 Tanggal 16 Februari 2021, untuk BLK Kabupaten Tanah Laut mendapatkan alokasi dana sebesar 1.776.170.000,- (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) meliputi Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dana program tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi , dengan rencana anggaran belanja program tahun 2021 sebagai berikut :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
026.13.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.776.170.000
	Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi BLK Kab. Tanah Laut (18 Paket)	
JUMLAH		1.776.170.000

Tabel 3.2

Jumlah anggaran kegiatan tersebut, terdiri atas beberapa kegiatan yaitu :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4060.072.003.053	Administrasi Kegiatan	172.390.000
4060.072.003.051	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Non Boarding)	1.603.780.000
UMLAH		1.776.170.000

Tabel 3.3

f. Realisasi Pelaksanaa Program dan Kegiatan

Realisasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

No	Jenis Pelatihan	Target Jumlah Paket/ Peserta	L	P	Realisasi Jumlah Akt/Peserta	%	Ket.
	MAK 2221.072.003						
1.	Pembuatan Roti dan Kue	3 Paket/48 org		48	48	100	-

No	Jenis Pelatihan	Target Jumlah Paket/ Peserta	L	P	Realisasi Jumlah Akt/Peserta	%	Ket.
2.	Teknisi AC	1 Paket/16 org		16	16	100	-
3.	Pengoperasian Komputer Dasar	1 Paket/16 org	6	10	16	100	-
4.	Mengerjakan Finishing dengan Teknis Semprot	1 Paket/16 org	16		16	100	-
5.	Menjahit Pakaian dengan Mesin	3 Paket/48 org	4	44	48	100	-
6.	Servis Sepeda Motor Injeksi	2 Paket/32 org	32		32	100	-
7.	Plate Welder SMAW 3G-UP PF	2 Paket/32 org	32		32	100	-
8.	Desain Grafis Muda	1 Paket/16 org	8	8	16	100	-
9.	Pemasangan Baja Ringan	2 Paket/32 org	32		32	100	-
10.	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana.	1 Paket/16 org	9	7	16	100	-
11.	Penata Rambut	1 Paket/16 org	5	11	16	100	-
	Jumlah		144	144	288		

Tabel 3.4

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
026.13.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.776.170.000	1.637.627.100	92,20 %	100 %

Tabel 3.5

dengan rincian kegiatan yaitu :

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN %	FISIK %
4060.051.027.051	Administrasi Kegiatan	172.390.000	148.608.700	86,20 %	100 %
4060.072.002.051	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Non Boarding)	1.603.780.000	1.489.018.400	92,84 %	100 %
JUMLAH		1.776.170.000	1.637.627.100	92,20 %	100 %

Tabel 3.6

g. Permasalahan dan solusi

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Jumlah pegawai tetap (PNS) yang ada di Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut pada bulan Januari 2021 hanya 13 orang, untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut, maka masih diperlukan adanya penambahan tenaga/ pegawai baru, hal ini disebabkan karena semakin padatnya kegiatan Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut. Untuk rencana ke depan, perlu adanya penambahan dan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk langkah regenerasi kepegawaian, mengingat usia pegawai di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut yang ada yang telah memasuki usia menjelang pensiun (masa pensiun kurang dari 3 tahun ke depan). Hal ini dirasakan perlu untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut agar dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut dimasa depan, maka diperlukan SDM pendukung yang lebih profesional dan memiliki kompetensi yang lebih baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. SDM yang ada masih perlu ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan pendidikan dan bimbingan teknis yang mendukung dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai, baik petugas Instruktur pelatihan kerja sebagai ujung tombak kegiatan pelayanan pelatihan maupun pegawai non struktural. Demikian juga dengan jumlah pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

UPAYA TINDAK LANJUT (SOLUSI)

1. Untuk mengatasi permasalahan perihal kekurangan dan pengembangan pegawai, Balai Lathan Kerja Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya tindak lanjut berupa pembuatan dan pengajuan daftar kebutuhan pegawai dan didalamnya terdapat informasi tentang jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan kepada Pemerintah kabupaten Tanah Laut.
2. Pengajuan daftar rencana pegawai yang mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi.
3. Pengajuan Anggaran berupa Rehab workshop baik melalui APBD maupun APBN.
4. Pengajuan Anggaran pembelian peralatan pelatihan baik melalui APBD maupun APBN, serta permintaan tambahan peralatan kepada Lemsar Kementrian Tenaga kerja RI.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerja Sama Daerah

a. Mitra yang diajak kerjasama

Kerjasama Dengan Bank KalSel, Bank BRI, Baznas, Forum Tala CSR

b. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

c. Bidang Kerjasama

Sosialisasi Permodalan

d. Nama Kegiatan

Pelatihan- Pelatihan dalam kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

-

f. Jangka waktu kerjasama

Tak terbatas

g. Hasil (output) dari kerjasama

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan Peran Baznas dan Perbankan dalam hal permodalan.

h. Permasalahan dan Solusi

-

2. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

3. Pengelolaan Kawasan Khusus

a. Jenis Kawasan Khusus :

Kawasan Industri

b. Status kepemilikan kawasan khusus :

Milik Swasta

c. Sumber Anggaran :

Swasta (pengelola)

d. Permasalahan yang dihadapi :

Pihak pengelola belum membangun infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban untuk memperoleh izin IUKI seperti yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 TAHUN 2015 tentang Kawasan Industri.

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tidak menyelenggarakan urusan/ kegiatan dimaksud.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu bahwa dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 telah memperoleh keberhasilan dalam menciptakan peningkatan keterampilan, kompetensi dan produktivitas pencari kerja, penempatan tenaga kerja, harmonisasi hubungan industrial melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan pemberdayaan industri kecil dan menengah.

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Perindustrian di Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Oleh karena itu penyelenggaraan dimaksud akan selalu bermuara pada pencapaian kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif yang bertumpu pada perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek sebagai akselerasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut.

Untuk terselenggaranya urusan wajib Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut hendaknya memperoleh anggaran yang memadai untuk revitalisasi sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kualitas instruktur / tenaga kepelatihan, pelatihan tenaga fungsional mediator dan tenaga fungsional pengantar kerja, keadaan ini bertujuan untuk mengurangi peta kerawanan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut.

Bidang Ketenaga kerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenaga kerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut.

Bidang Perindustrian sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku industri kecil menengah dengan adanya peningkatan keterampilan dan standarisasi IKM serta pemberdayaan IKM melalui even-even promosi, Dekranasda, pusat promosi Tambang Ulang.

Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaannya.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :

1. Penguatan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian
2. Penguatan kelembagaan dan personil
3. Membangun jaringan kerja
4. Pemanfaatan teknologi informasi

Pelaihari, 17 Januari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

LAMPIRAN

IKK OUTPUT BIDANG TENAGA KERJA

NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Jumlah Dokumen RTKD	Data Internal	100% (1 Dokumen)
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	99,18%	PUSDATIK KEMNAKER RI Tahun 2021	Rumus Perhitungan dari form akurasi RTK dengan Data Sakernas Pusdatik KEMNAKER RI Tahun 2021
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Nilai	Data Internal	Kegiatan baru akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2022
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	4.85%	Data Internal, SKKNI Kemaker	
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	52.05%	BLK Pelaihari, BLK Komunitas dan LPK Swasta	Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 38 orang dari total instruktur 73 orang
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	4.82%	BLK Pelaihari, BLK Komunitas dan LPK Swasta	Jumlah Instruktur Keseluruhan adalah 73 orang dan jumlah peserta yang dilatih sebanyak 1514 orang
		4	Persentase LPK yang Terakreditasi	17.39%	Data Internal	Dari Total 23 LPK baru 4 LPK yang terakreditasi
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	56.52%	Data Internal	Total LPK 23 sedangkan yang aktif 10 LPK
		6	jumlah penganggur yang dilatih	1514 orang	Data Internal	Jumlah penganggur yang dilatih adalah total jumlah peserta yang dilatih oleh BLK Pelaihari, BLK Komunitas, LPK Swasta, Program Pemagangan
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	71.27%	Data Internal	Lulusan yang bersertifikat pelatihan sebanyak 1079 orang dari total lulusan 1495 orang (karena pelatihan di Desa yang diselenggarakan BLK Pelaihari tidak mendapat sertifikat Pelatihan sebanyak 416 orang)

NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
		8	Persentase penyerapan lulusan	-	Data Internal	Data jumlah lulusan sebanyak 1495 akan tetapi Data Penyerapan lulusan tidak ada datanya karena BLK Komunitas dan LPK Swasta tidak berkewajiban melaporkan lulusannya yang bekerja
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	27.54%	Data Internal	Jumlah Lulusan yang bersertifikat kompetensi adalah sebanyak 417 orang dari 1514 orang yang dilatih
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	nihil	Disnakerind	
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	nihil	Disnakerind	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0,75%		
		2	Data tingkat produktivitas total	-6,02%		
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	4,41%	WLKP Online	$\frac{\sum PP}{\sum \text{Perusahaan}} \times 100\%$
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0,73%	Laporan Kinerja	$\frac{\sum PKB}{\sum \text{Perusahaan}} \times 100\%$
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	5	Laporan Kinerja	
		5	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	5,88%	WLKP	
		6	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	272,79	BPJS	
		7	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	3,67%	Laporan Kinerja	$\frac{5}{136} \times 100\%$
		8	Jumlah mogok kerja	nihil		
		9	Jumlah penutupan Perusahaan	2	Surat	
		10	Jumlah perselisihan kepentingan	nihil		
		11	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	nihil		
		12	Jumlah perselisihan PIIK	5	Laporan Kinerja	
		13	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	280	Laporan Kinerja	
		14	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	Laporan Kinerja	
		15	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	SK Bupati	
		16	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	2	Laporan Kinerja	
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	235
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota			1141	Disnakerind	
3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota			10	Disnakerind	
4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			26		
5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			1	Disnakerind	

NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Disnakerind	
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	2516 PKWT	Disnakerind	
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	216	Disnakerind	
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	60	Disnakerind	
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	4	Disnakerind	
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi Kepulangan	1	Disnakerind	
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	nihil	Disnakerind	
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	2 (dua) orang	BP2PMI	Database dari BP2PMI
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	nihil	Disnakerind	

IKK OUTCOME BIDANG TENAGA KERJA

No IKK	Data yang diperlukan	Capaian	Keterangan Sumber Data
42	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	97,30%	Data Internal
	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	98,86%	Data Internal berdasarkan capaian kinerja kegiatan di seluruh kab tanah laut
43	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	417	Data Internal dari total peserta yang dilatih
	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	17.8543	BPS
44	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Rp. 10,161,900,000	BPS (PDRB Tahun 2020 **) untuk tahun 2021 belum rilis
	Jumlah tenaga kerja	17.8543	BPS
45	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	22 Perusahaan	Laporan Kinerja Bulanan (Internal)
	Jumlah perusahaan	136 Perusahaan	WLKP Online (Eksternal)
46	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	220	Disnakerind Kab. Tala
	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1144	Disnakerind Kab. Tala
47	Jumlah ARG pada belanja langsung	15,394,743,445.00	Laporan Realisasi Anggaran
	Jumlah seluruh belanja langsung di	11,327,431,529.98	Laporan Realisasi Anggaran

IKK OUTPUT BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Data OSS dan Data Internal	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	$(100/100) \times 100\% = 100\%$	Data Internal	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$(82/82) \times 100\% = 100\%$	Data OSS dan Data SiiNas	
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SiiNas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$(32/60) \times 100\% = 53\%$	Data SiiNas dan Data internal	

IKK OUTCOME BIDANG PERINDUSTRIAN

No IKK	Data yang diperlukan	Capaian	Keterangan Sumber Data
100	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2020	$\frac{(\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2020} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2019})}{\text{Jumlah IKM tahun 2019}} \times 100\%$ $= \frac{(3458-3378)}{3378} \times 100\% = 2,36\%$	Data Internal
	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2019		
101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$2/4 \times 100\% = 50\%$	Data BPS, Data Internal
102	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	$(82/82) \times 100\%$	Data OSS dan Data Internal
	Jumlah izin yang dikeluarkan	$(82/82) \times 100\%$	Data OSS dan Data Internal
103	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	nihil	Data OSS dan Data Internal
	Jumlah izin yang dikeluarkan	nihil	Data OSS dan Data Internal
104	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	nihil	Data OSS dan Data Internal
	Jumlah izin yang dikeluarkan	nihil	Data OSS dan Data Internal
105	Keterkinian informasi industri	100%	Data Internal
	Kelengkapan informasi industri meliputi	1. Data IKM pada Aplikasi Gayatri 2. Data Industri Menengah dan Industri Besar pada Aplikasi SiiNas	Data Internal dan Data SiiNas